

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI**

**Siti Hotimah, Bambang Koesbandrijo**

hsiti1997@gmail.com, bambang\_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ***Abstract***

*In the implementation of the distribution of non-cash food assistance (BPNT) in the city of Surabaya, especially in the Sidotopo Kelurahan there are active e-warong and e-warong that are passive (inactive) so that there is a long queue at a certain date and time when the distribution of non-cash food aid (BPNT). In implementing the e-warong program in accordance with Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia Regulation Number 11 of 2018 concerning Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) according to Van Meter and Van Horn (1975) in Agostino 2006, it provides the view that policy implementation is influenced by six interrelated variables related namely: policy standards and targets / measures and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, dispositions or attitudes of implementers, communication between related organizations and implementation activities, social, economic and political environment. The purpose of the researcher is to find out and analyze the implementation of the electronic mutual assistance program in Sidotopo Village, Surabaya City. In making thesis using qualitative descriptive methods to describe the phenomena that exist at the time of study. Based on the results of research that has been done, it is known that the standard and policy ratio is not optimal and not yet on target because it only knows in broad outline, resources are the most influential in the implementation of electronic mutual assistance (e-warong) programs, namely the availability of e-warong in Sidotopo Village there is only one, the implementing organization characteristics apply the principles of openness, transparency, and democracy but for e-warong is closed, communication between the implementing organization is only to the implementing TOP so that there is no clarity, harmony and uniformity of information, disposition or attitude of the implementer in this matter lack of knowledge, understanding and depth of policy, response from KPM itself which always accepts and resigns, social, economic and political environmental factors are community strategies to improve economic conditions with the presence of BPNT and e-warong as BPNT suppliers, allegedly there are political conflicts in ith the use of positions with the scope of the family. The author provides recommendations for the implementation of electronic mutual assistance programs (e-warong), especially in the Sidotopo District to be neutral and strict in licensing procurement and the establishment of e-warong, in order to continue to communicate hierarchically, formally and flexibly, preferably there are Standard Operating Procedures that clearly, socialization, education and evaluation must be firm and strict and there is a follow up and in verifying KPM data must be realistic, accurate and reliable.*

**Keywords:** *Implementation, Non-Cash Food Aid, e-warong*

### **Abstrak**

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di kota Surabaya khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo terdapat e-warung yang aktif dan e-warung yang pasif (tidak aktif) sehingga terdapat antrian panjang pada tanggal dan waktu tertentu pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam pelaksanaan program e-warung yang sesuai dengan Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agostino 2006 memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan yakni : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun tujuan dari peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program elektronik warung gotong royong di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Dalam pembuatan skripsi menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat studi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan belum optimal dan belum sesuai target karena hanya mengetahui secara garis besar saja, sumberdaya merupakan yang paling mempengaruhi pelaksanaan program elektronik warung gotong royong (e-warung) yakni ketersediaan e-warung di Kelurahan Sidotopo hanya ada satu saja, karakteristik organisasi pelaksana menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan demokrasi tetapi untuk e-warungnya bersifat tertutup, komunikasi antar organisasi pelaksana hanya pada TOP pelaksana saja sehingga tidak ada kejelasan, keselarasan dan keseragaman informasi, disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari KPM sendiri yang selalu menerima dan pasrah, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya BPNT dan e-warung sebagai penyalur BPNT, disinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup keluarga. Penulis memberikan rekomendasi upaya pelaksanaan program elektronik warung gotong royong (e-warung) khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo untuk netral dan ketat dalam perijinan pengadaan dan pendirian e-warung, agar tetap melakukan komunikasi secara hierarkis, formal dan fleksibel, sebaiknya terdapat Standar Operasional prosedur yang jelas, sosialisasi, edukasi dan evaluasi harus tegas dan ketat serta ada tindak lanjut dan dalam memverifikasi data KPM harus realistis, akurat dan terpercaya.

**Kata kunci :** Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, e-warung

### **Pendahuluan**

Di Negara Indonesia khususnya Kota Surabaya yang dikenal oleh berbagai kota di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri sebagai kota pintar dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan dalam pengelolaan tata kota yang serba modern, canggih serta mengikuti perkembangan informasi teknologi (IT)

dengan menerapkan *electronics government*. Semua keistimewaan yang dimiliki oleh kota Surabaya bukan berarti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjadi sejahtera. Di kota Surabaya juga masih mendapatkan masalah akan kemiskinan yang dinilai tingkat kemiskinannya cukup rendah jika dibandingkan skala nasional. "Kemiskinan khususnya pedesaan Jawa Timur masih nomor satu di Indonesia. Ini tantangan bagi saya sebagai Gubernur Jawa Timur untuk mencari solusi konkrit bagaimana menurunkan kemiskinan bisa dipercepat," kata Gubernur Khofifah. "Kalau kemiskinan di kota cenderung sudah rendah. Di Batu ini angkanya kemiskinannya 3,9 persen, untuk kemiskinan di Surabaya 4,7 persen. Nah untuk kemiskinan di desa itu sampai 11,8 persen," sambungnya ([surya.co.id/6maret2019](http://surya.co.id/6maret2019)).

Kepedulian pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: "Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara." Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ *e-warong* yang bekerjasama dengan bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di *e-warong*. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan. Realitas di masyarakat banyak yang tidak mengetahui akal hal tersebut sehingga masyarakat memiliki pemikiran kalau pembagian bantuan tersebut tidak

diambil pada saat waktu yang sudah ditentukan akan habis atau jatahnya hilang(Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Kecamatan Semampir tepatnya di kelurahan Sidotopo terdapat beberapa agen *e-warong* dan salah satunya di Toko syafaa sebagai agen *e-warong* yang berada di kelurahan Sidotopo beralamat di Jl. Sidotopo lor ini setiap akhir bulan selalu ramai dikunjungi oleh pembeli sampai antri hingga berlarut dalam 1 hari mulai pagi hingga malam hari dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat(KPM) untuk bertransaksi membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur dan minyak. Tetapi pada tanggal yang sama ada juga agen *e-warong* yang sepi dengan pembeli atau keluarga penerima manfaat(KPM) di wilayah yang sama dengan Toko Syafaa. Oleh karena itu peneliti ingin mengalih dan menganalisis bagaimana dalam pelaksanaan program *e-warong* di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sehingga terjadi antrian yang panjang pada waktu dan tanggal tertentu saja dan tidak merata dalam bertransaksi. pelaksanaannya. Bertitik tolak dengan latar belakang diatas, maka penyusun mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program *E-warong* di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data yang mendalam mengenai Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Tentang Program Elektronik Warung Gotong Royong di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya) dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan dan keberhasilan program ini pihak-pihak terkait melakukan persiapan pelaksanaan, penyampaian data penerima manfaat, pembentukan *e-warong*, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan/atau pembukaan rekening. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Wibawa, dkk. (1994: 15) dikutip Daru Wisakti (2008:30) Komponen yang saling berkaitan, siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dalam pelaksanaan program *e-warong* ini terdapat faktor penghambat yakni dari sumber daya manusianya, sumber daya alatnya (mesin *edc* sering error), sumber daya waktu (waktu penyaluran tidak tepat waktu), sumberdaya tempat (ketersediaan *e-warong* sangat minim atau kurang jika dibandingkan jumlah penerima manfaat), sumberdaya wewenang (pembagian tugas belum jelas dan kurang dimengerti). Selain sumber daya sikap pelaksana juga mempengaruhi pelaksanaan program *e-warong* ini (pelaksana *e-warong* yang judes dan sombong, Kasi Kesejahteraan Kelurahan Sidotopo yang bersikap dingin terhadap koordinasi kepada *e-warong*, tim pendamping yang kaku). Dan yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan program *e-warong* di Kelurahan Sidotopo yakni komunikasi, dari hasil wawancara komunikasi antar organisasi yang terkait tidak seragam, informasi yang diberikan dari Dinas terkait tidak sampai ke penerima manfaat, kejelasan informasi tidak ada bagi penerima manfaat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam pelaksanaan program *e-warong* di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya dengan menggunakan teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan dipengaruhi 6 variabel-variabel dapat ditarik kesimpulan yakni: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, belum optimal dan belum sesuai target karena pelaksana dan KPM hanya mengetahui secara garis besar saja, sumberdaya yang paling

mempengaruhi pelaksanaan program e-warong di Kelurahan Sidotopo yakni ketersediaan e-warong yang kurang hanya ada satu saja, dalam pelaksanaan penyaluran di e-warong terdapat peralatan mesin edc yang minim dan sering eror, pelaksanaan penyaluran tidak sesuai dengan metode penyaluran, jumlah anggota tim yang kurang dalam pelayanan di e-warong, kesesuaian dana dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial nomo 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tetapi KPM tidak mengetahui nominal besaran bantuan, karakteristik organisasi pelaksana, Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan Sidotopo dan TKSK atau tim pendamping menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan demokrasi tetapi, untuk organisasi pelaksana di *e-warong* bersifat tertutup, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, di lapangan informasi dan koordinasi yang lengkap hanya pada TOP pelaksana sehingga tidak ada kejelasan, keselarasan dan keseragaman terkait informasi dari tingkatan hierarki jadi komunikasinya tidak berjalan dengan baik, disposisi atau sikap para pelaksana, dalam hal pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari KPM sendiri yang selalu menerima dan pasrah, pelaksana yang hanya berpangku tangan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya BPNT dan *e-warong* sebagai penyaluran BPNT, di sinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto.(2010). *revitalisasi administrasi negara,reforasi birokrasi dan e-governance.yogyakarta: graha ilmu*
- Ismail, Hasan.(2017). *Implementasi Kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur*, Surabaya (Skripsi). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya
- Indrajit, richardus eko.(2002). *Membangun aplikasi e-government*. Jakarta:pt elek media komputindo.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta Pusat.